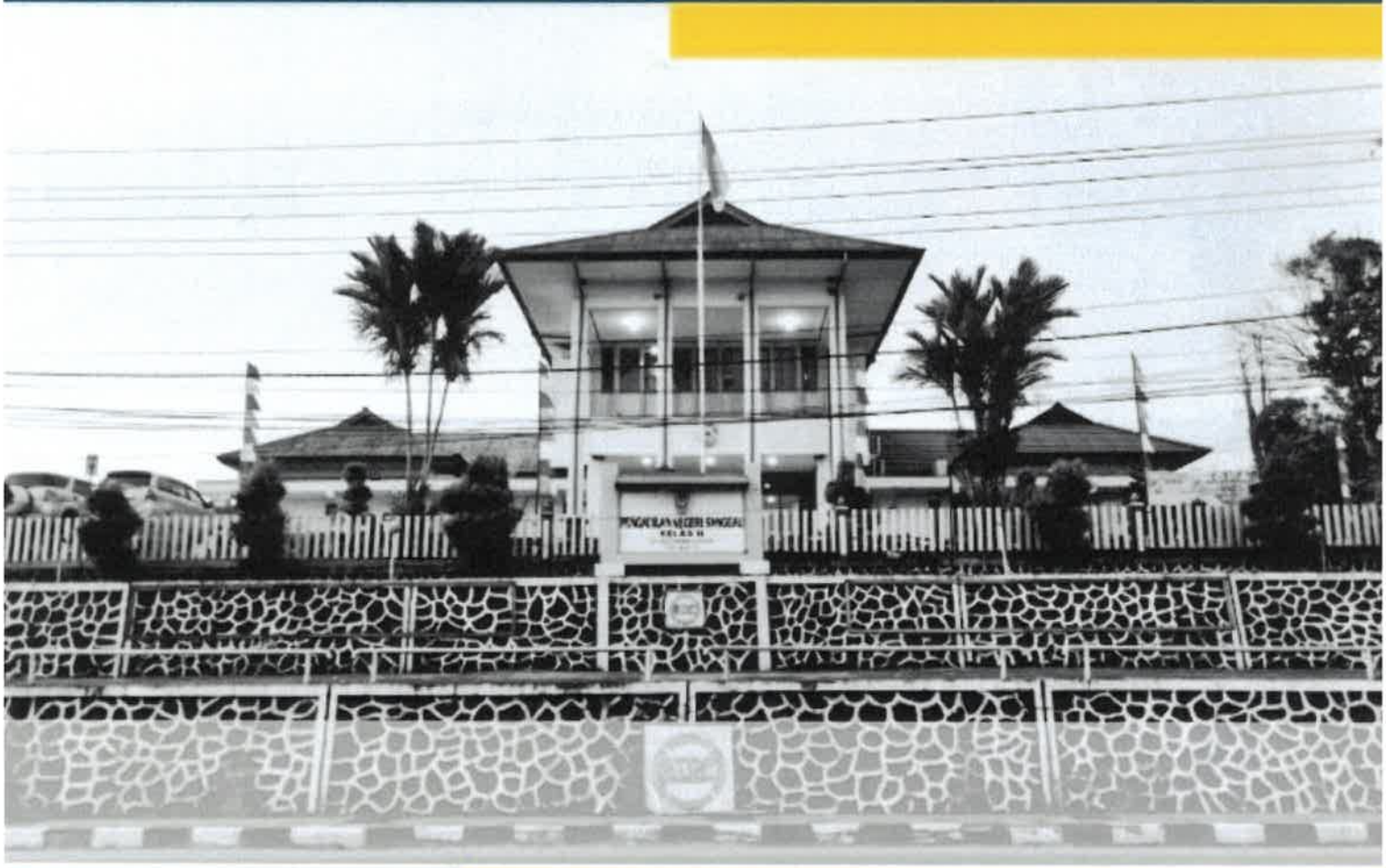
PENGADILAN
NEGERI
SANGGAU

TAHUN 2025

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



0564-21443 info@pn-sanggau.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2025 kepada publik.

Di dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang kami susun ini memuat laporan hasil manajemen perkara, manajemen aset, keuangan dan sumber daya manusia yang kami lakukan selama tahun 2025 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat, selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan dalam rangka upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi Mahkamah Agung RI.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2025 ini telah kami upayakan sebaik mungkin, walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-insatansi yang memayungi kami ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan dari kami kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sanggau atas kerjasama bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas pada Pengadilan Negeri Sanggau, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat menjadi pedoman untuk perbaikan kinerja pada Pengadilan Negeri Sanggau.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau pada masa-masa yang akan datang.

Sanggau, 20 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 1
B. VISI DAN MISI 3
C. RENCANA STRATEGIS 3
BAB II 9
KEADAAN PERKARA 9
A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM 9
a) Perkara Pidana 9
b) Perkara Perdata 10
B. PENYELESAIAN PERKARA 13
C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 15
BAB III 19
SUMBER DAYA MANUSIA 19
A. KOMPOSISI SDM DI PENGADILAN NEGERI SANGGAU 19
B. MUTASI 27
C. PROMOSI 27
D. PENSIUN 28
E. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT) 28
BAB IV 31
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKONOLOGI INFORMASI 31
A. PENGELOLAAN KEUANGAN 31
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 32
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 35
BAB V 42
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 42
A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN 42
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 43
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 44

BAB VI 46
PENGAWASAN 46
A. INTERNAL 46
B. EVALUASI 47
BAB VII 49
PENUTUP 49
A. KESIMPULAN 49
B. REKOMENDASI 50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peresentase Sasaran Strategis 1 5
Tabel 1. 2 Sasaran Strategis 2 6
Tabel 1. 3 Peresentase Sasaran Strategis 3 8
Tabel 2. 1 Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2025 13
Tabel 2. 2 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2025 13
Tabel 2. 3 Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025 13
Tabel 2. 4 Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025 13
Tabel 2. 5 Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025 14
Tabel 2. 6 Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi Tahun 2025 14
Tabel 2. 7 Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2025 14
Tabel 2. 8 Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025 14
Tabel 2. 9 Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara E-Berpadu Tahun 2025 14
Tabel 2. 10 Layanan Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025 15
Tabel 2. 11 Rekapitulasi Pelayanan POSBAKUM Sanggau Tahun 2025 17
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Sidang Keliling pada Zitting Plaatz PN Sanggau Tahun 2025 17
Tabel 2. 13 Rekapitulasi Perkara Prodeo PN Sanggau Tahun 2025 18
Tabel. 3 1 Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025 23
Tabel. 3 2 Mutasi Masuk Ke Pengadilan Negeri Sanggau 27
Tabel. 3 3 Mutasi Keluar Dari Pengadilan Negeri Sanggau 27
Tabel. 3 4 Promosi Jabatan Di Pengadilan Negeri Sanggau 27
Tabel. 3 5 Tabel Pegawai Pensiun Di Pengadilan Negeri Sanggau 28
Tabel. 3 6 Tabel Diklat Di Pengadilan Negeri Sanggau 30
Tabel 4. 1 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) 31
Tabel 4. 2 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 (Dirjen BADILUM) 32
Tabel 4. 3 Pengelolaan Gedung dan Bangunan 32
Tabel 4. 4 Pengelolaan Kendaraan Dinas 33
Tabel 4. 5 Pengelolaan Rumah Dinas 33
Tabel 4. 6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana 34
Tabel 4. 7 Pembelian/Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 34
Tabel 4. 8 Penerimaan Transfer Masuk dari Badan Urusan Mahkamah Agung RI 34
Tabel 4. 9 Pererimaah Hibah 35
Tabel 4. 10 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) 35

Tabel 4. 11 Perkara Perdata Menggunakan E-Court 35
Tabel 4. 12 Detail Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau Januari – Desember 2025 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kab.Sanggau 2
Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sekadau 2
Gambar 2. 1 Perkara Pidana Biasa Tahun 2025 9
Gambar 2. 2 Perkara Pidana Singkat Tahun 2025 9
Gambar 2. 3 Perkara Pidana Cepat Tahun 2025 9
Gambar 2. 4 Perkara Lalu Lintas Tahun 2025 10
Gambar 2. 5 Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2025 10
Gambar 2. 6 Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2025 10
Gambar 2. 7 Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025 11
Gambar 2. 8 Perkara Perdata Permohonan Tahun 2025 11
Gambar 2. 9 Perkara Perdata Gugatan Sederhana 11
Gambar 2. 10 Perkara Perdata Konsinyasi Tahun 2025 12
Gambar 2. 11 Grafik 1 Jumlah Perkara Diterima dan mediasi 12
Gambar 2. 12 Grafik 2 Jumlah Perkara Diterima dan Mediasi 12
Gambar 2. 13 Ruangan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sanggau 16
Gambar 3. 1 Tingkat Jabatan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau 19
Gambar 3. 2 Tingkat Golongan Pegwai Di Pengadilan Negeri Sanggau 20
Gambar 3. 3 Tingkat Pendidikan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau 20
Gambar 3. 4 Statistik Usia Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau 21
Gambar 3. 5 Statistik Jabatan Di Pengadilan Negeri Sanggau 21
Gambar 3. 6 Statistik Jenis Kelaminan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau 22
Gambar 4. 1 Meja E-Court Corner Pengadilan Negeri Sanggau 36
Gambar 5. 1 Meja Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Sanggau 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Sanggau memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. Pengadilan Negeri Sanggau masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan daerah hukumnya meliputi wilayah 2 (dua) Kabupaten yang terdiri dari sebagai berikut:
   - Kabupaten Sanggau;
   - Kabupaten Sekadau;

Mengingat tanggungjawab Pengadilan Negeri Sanggau yang begitu besar, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Sanggau selama tahun 2025 ini telah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat diantaranya ialah mengaplikasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara menyeluruh dan telah terintegrasi dengan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dengan berbagai macam kemudahan bagi pengguna pengadilan selain itu Pengadilan Negeri Sanggau juga telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah terintegrasi dengan eraterang Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih mengefektifkan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sanggau telah melakukan peningkatan terhadap Pengelolaan Informasi dan Teknologi (IT) serta fasilitas penunjang guna Pengolahan data demi terwujudnya ketepatan dan keakuratan data yang tersaji dalam SIPP.

Guna Memberikan pelayanan yang maksimal bagi pengguna pengadilan maka sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum maka Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang

berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna pengadilan untuk lebih mempermudah proses pendaftaran perkara maupun pelayanan administrasi lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sanggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang melayani wilayah hukum Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan pengadilan yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Sanggau dan Sekadau dan memiliki 3 (tiga) kantor Kejaksaan yang berada dalam wilayah yurisdikti tersebut yakni Kejaksaan Negeri Sanggau, Kejaksaan Negeri Sekadau dan Cabang Kejaksaan Negeri Sangggau di Entikong. Luasnya wilayah Pengadilan Negeri Sanggau tersebut berimplikasi kepada banyaknya jumlah perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Sanggau. Saat ini Pengadilan Negeri Sanggau masuk kedalam kategori Pengadilan Negeri Kelas II yang memiliki jumlah penyelesaian perkara 501-1000 perkara dengan diikuti variatif perkara setiap tahunnya.



Gambar 1. 1 Peta Wilayah Kab.Sanggau



Gambar 1. 2 Peta Wilayah Kab. Sekadau

B. VISI DAN MISI

Visi :

Visi Pengadilan Negeri Sanggau adalah
"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGGAU YANG AGUNG."

Misi :

3. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sanggau.
4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pengguna pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sanggau.
6. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sanggau

C. RENCANA STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Sanggau dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) **mewujudkan pengadilan negeri sanggau yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan** dan (2) **mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional**. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di Pengadilan Negeri Sanggau.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis di atas, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Sanggau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis sebagai berikut:

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Sanggau untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,Akuntabel , responsif dan modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirim kan kepada para pihak secara tepat waktu / Jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu / Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu / Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.5	Persentase putusan pengadilan Yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju / Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan / Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif / Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%
	1.8	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi / Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi / Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x 100%
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunaka e-court / Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan x 100%
	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik / Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik / Jumlah layanan perkara pidana x 100%

Tabel 1. 1 Peresentase Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Sanggau memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multiaspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu.

Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Sanggau menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Sanggau berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Tabel 1. 2 Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Sanggau dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil *(result-oriented)*.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sanggau menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
	3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%)
	3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: – Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) – Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: – Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) – Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) – Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Tabel 1. 3 Peresentase Sasaran Strategis 3

BAB II
KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

a) Perkara Pidana

Keadaan perkara Pidana Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perkara pidana biasa

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	43	28	71	27	5	27	27	0	44	175	130
2	Februari	44	31	75	30	8	30	28	2	47	188	138
3	Maret	47	42	89	31	8	33	33	0	56	201	149
4	April	56	14	70	14	6	14	8	6	62	154	115
5	Mei	62	33	95	36	19	42	30	12	65	212	158
6	Juni	65	38	103	20	43	32	28	4	75	237	174
7	Juli	75	38	113	68	3	72	65	7	48	255	192
8	Agustus	48	34	82	30	7	37	29	8	53	181	140
9	September	53	21	74	20	4	28	27	1	47	174	132
10	Oktober	47	36	83	35	0	36	27	9	56	162	126
11	November	56	39	95	39	0	48	44	4	51	194	146
12	Desember	51	17	68	47	0	51	51	0	17	123	82
Total			371		397			397			2256	1682

Gambar 2. 1 Perkara Pidana Biasa Tahun 2025

2. Perkara pidana singkat

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0		0			0			0	0

Gambar 2. 2 Perkara Pidana Singkat Tahun 2025

3. Perkara pidana cepat

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	2
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	2	2	2	0	2	2	0	0	2	2
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	3	3	3	0	3	3	0	0	5	5
8	Agustus	0	1	1	1	0	1	1	0	0	3	3
9	September	0	2	2	2	0	2	2	0	0	4	2
10	Oktober	0	3	3	3	0	3	3	0	0	6	4
11	November	0	2	2	2	0	2	2	0	0	2	2
12	Desember	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1
Total			15		15			15			25	21

Gambar 2. 3 Perkara Pidana Cepat Tahun 2025

4. Perkara lalu lintas

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	20	20	20	0	20	20	0	0	60	20
2	Februari	0	95	95	95	0	95	95	0	0	285	95
3	Maret	0	381	381	381	0	381	381	0	0	1143	381
4	April	0	73	73	73	0	73	73	0	0	219	73
5	Mei	0	79	79	79	0	79	79	0	0	237	79
6	Juni	0	96	96	96	0	96	96	0	0	288	96
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	204	204	204	0	204	204	0	0	606	204
9	September	0	65	65	65	0	65	65	0	0	195	65
10	Oktober	0	45	45	45	0	45	45	0	0	135	45
11	November	0	15	15	15	0	15	15	0	0	45	15
12	Desember	0	117	117	117	0	117	117	0	0	351	117
Total			1190		1190			1190			3564	1190

Gambar 2. 4 Perkara Lalu Lintas Tahun 2025

5. Perkara pidana khusus anak

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	3	3	1	0	1	1	0	2	5	4
2	Februari	2	4	6	6	0	6	6	0	0	10	7
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	2	2	2	0	2	2	0	0	3	2
8	Agustus	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
9	September	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	1	1	1	0	1	1	0	0	2	1
Total			11		11			11			22	14

Gambar 2. 5 Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2025

6. Perkara pidana praperadilan

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			0		0			0			0	0

Gambar 2. 6 Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2025

b) Perkara Perdata

Keadaan perkara Perdata Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perkara perdata gugatan

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	SELISIH PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	13	0	0	5	18	9	0	0	1	0	0	9	0	9	0	9
2	Februari	9	0	0	12	21	3	4	0	1	0	0	3	0	3	0	18
3	Maret	18	0	0	3	21	8	5	0	0	0	0	8	0	8	0	13
4	April	13	0	0	10	23	5	11	0	1	0	0	5	0	5	0	18
5	Mei	18	0	0	4	22	6	11	0	3	0	1	6	0	4	2	17
6	Juni	16	2	0	8	26	2	16	0	2	0	0	4	0	4	0	22
7	Juli	22	0	0	6	28	7	4	0	2	0	0	7	0	6	1	22
8	Agustus	21	1	0	8	30	12	4	0	4	0	0	13	0	12	1	18
9	September	17	1	0	13	31	8	3	0	0	0	0	9	0	6	3	25
10	Oktober	22	3	0	5	30	8	2	0	4	0	0	11	0	6	5	24
11	November	19	5	0	5	29	12	0	0	1	0	0	17	0	16	1	13
12	Desember	12	1	0	4	17	4	0	0	1	0	1	5	0	5	0	11
TOTAL					83		84		0	20	0	2			84		

Gambar 2. 7 Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025

2. Perkara perdata permohonan

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	SELISIH PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	1	0	0	4	5	4	0	0	0	0	0	4	0	3	1	2
2	Februari	1	1	0	11	13	6	0	0	0	0	0	7	0	6	1	7
3	Maret	6	1	0	7	14	9	2	0	0	0	0	10	0	10	0	4
4	April	4	0	0	8	12	6	0	0	0	0	0	6	0	5	1	7
5	Mei	6	1	0	16	23	17	0	0	0	0	0	18	0	14	4	9
6	Juni	5	4	0	11	20	9	0	0	0	0	0	13	0	10	3	10
7	Juli	7	3	0	16	26	17	0	0	0	0	0	20	0	19	1	7
8	Agustus	6	1	0	7	14	11	0	0	0	0	0	12	0	11	1	3
9	September	2	1	0	9	12	6	0	0	0	0	0	7	0	6	1	6
10	Oktober	5	1	0	8	14	8	0	0	0	0	0	9	0	9	0	5
11	November	5	0	0	8	13	10	0	0	0	0	0	10	0	9	1	4
12	Desember	3	1	0	6	10	9	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
TOTAL					111		112		0	0	0	0			112		

Gambar 2. 8 Perkara Perdata Permohonan Tahun 2025

3. Perkara perdata gugatan sederhana

No	Periode	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara Diputus	Status Penyelesaian Perkara				Jenis Gelamin	
				Akta Perdamaian	Penetapan Dismissal	Penetapan Gugur	Putusan	Laki - Laki	Perempuan
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	1	-	-	-	-	-	1	-
7	Juli	-	1	-	-	-	1	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	3	-	-	-	-	-	2	1
12	Desember	-	3	-	-	-	3	-	-
TOTAL		4	4	-	-	-	4	3	1

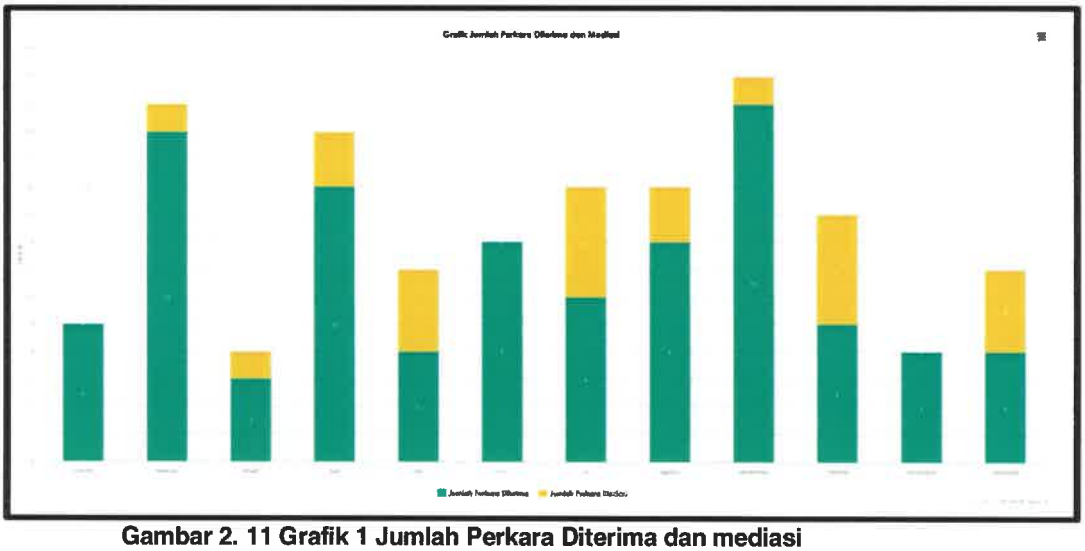
Gambar 2. 9 Perkara Perdata Gugatan Sederhana

4. Perkara perdata konsinyasi

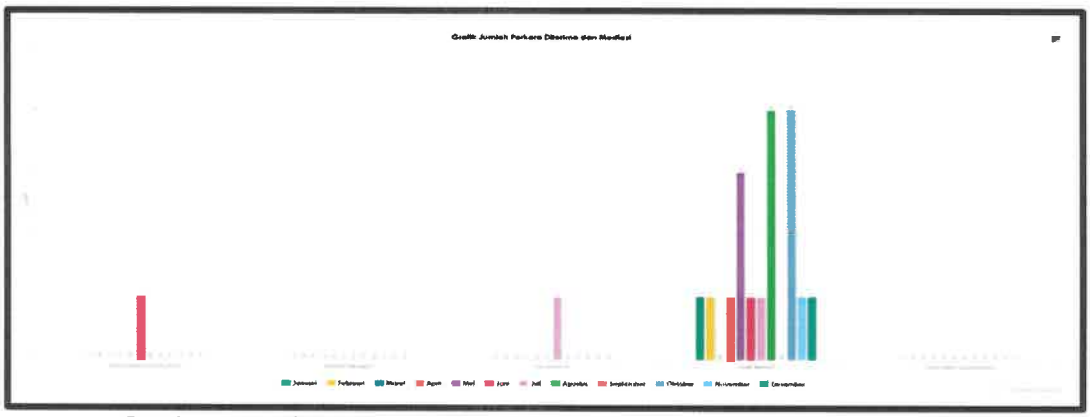
NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	SELISIH PEMBACAAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	10	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	Desember	10	0	0	0	10	10	2	0	0	0	0	10	0	10	0	0
TOTAL					10		10		0	0	0	0			10		

Gambar 2. 10 Perkara Perdata Konsinyasi Tahun 2025

5. Data mediasi Pengadilan Negeri Sanggau



Gambar 2. 11 Grafik 1 Jumlah Perkara Diterima dan mediasi



Gambar 2. 12 Grafik 2 Jumlah Perkara Diterima dan Mediasi

B. PENYELESAIAN PERKARA

c) Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

1. Perkara Pidana

PERKARA PIDANA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS. ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PRADILAN
Sisa Tahun 2024	43	-	-	-	-	-
Masuk Tahun 2025	371	11	-	2	1190	2
Putus Tepat Waktu	397	11	-	2	1190	2

Tabel 2. 1 Penyelesaian Perkara Pidana Secara Tepat Waktu Tahun 2025

2. Perkara Perdata

PERKARA PERDATA	JUMLAH					
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	EKSEKUSI RISALAH LELANG
Sisa Tahun 2024	12	1	-	-	-	-
Masuk Tahun 2025	83	111	4	10	-	-
Putus Tepat Waktu	81	111	3	10	-	-

Tabel 2. 2 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Tepat Waktu Tahun 2025

3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Perkara Pidana

PERKARA PIDANA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PERADILA
Putus Tahun 2025	397	11	-	15	1190	2
Upaya Hukum	127	1	-	-	-	-
PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM (BD,KS,PK)	270	10	-	15	1190	2

Tabel 2. 3 Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025

b. Perkara Perdata

PERKARA PERDATA	JUMLAH					
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	EKSEKUSI RISALAH
Putus Tahun	84	112	4	10	-	1
Upaya Hukum	16	-	-	-	-	-
PERKARA YANG TIDAK MELAKUKAN UPAYA	68	112	4	10	-	1

Tabel 2. 4 Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2025

4. Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

PERKARA PIDANA	JUMLAH RESTORATIF
JUMLAH PERKARA MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF	4

Tabel 2. 5 Perkara Pidana Yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2025

5. Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi

PERKARA PERDATA	JUMLAH	PERSENTASE
JUMLAH PERKARA	94	-
JUMLAH PERKARA MEDIASI	22	23%
BERHASIL (AKTA DAMAI)	1	5%
BERHASIL SEBAGIAN	-	-
BERHASIL (CABUT)	1	5%
TIDAK BERHASIL	18	82%
MEDIASI BERJALAN	2	9%

Tabel 2. 6 Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi Tahun 2025

6. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

PERKARA PIDANA	JUMLAH DIVERSI
JUMLAH PERKARA	11
JUMLAH PERKARA DIVERSI	3
BERHASIL	1
TIDAK BERHASIL	2

Tabel 2. 7 Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2025

7. Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court

PERKARA PERDATA	JUMLAH					
	GUGATAN	PERMOHONAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN KONSINYASI	EKSEKUSI PUTUSAN	EKSEKUSI RISALAH LELANG
MASUK TAHUN 2025	83	111	4	10	-	-

Tabel 2. 8 Perkara Perdata Yang Menggunakan E-Court Tahun 2025

8. Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

PERKARA PERDATA	JUMLAH					
	BIASA	PID.SUS. ANAK	SINGKAT	RINGAN/ CEPAT	LANTAS	PRA PRADILAN
MASUK TAHUN 2025	371	11	-	-	-	-

Tabel 2. 9 Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara E-Berpadu Tahun 2025

9. Layanan Pidana yang Diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

	JUMLAH					
	BESUK	SITA	GELEDAH	PERPANJANGAN PENAHANAN PSL 25	PERPANJANGAN PENAHANAN	DIVERSI
Permohonan Masuk	1.113	432	95	331	331	8
Permohonan Disetujui	919	428	95	331	331	8
Permohonan Tidak Disetujui	194	2	-	-	-	-
Sisa Permohonan		3	-	-	-	-

Tabel 2. 10 Layanan Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) Tahun 2025

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

10. Pos Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Sanggau bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan 94 Bersatu Cabang Sanggau memberikan layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat pengguna pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau.

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Sanggau bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
   a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
   b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
   c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-Cuma
2. Petugas pemberi layanan bantuan hukum adalah advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama kelembagaan Pengadilan Negeri Sanggau dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau;

3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Sanggau;

4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.



Gambar 2. 13 Ruangan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sanggau

Waktu pelayanan Hari kerja mulai Senin s/d Kamis pukul : 09.00 s/d 13.00 Wib, pelayanan yang diberikan antara lain :

- Konsultasi Hukum
- Penulisan Dokumen Hukum
- Bantuan untuk memperoleh layanan advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan, tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2025:

NO	Periode	Jumlah Layanan	Keterangan
1.	Januari – Maret 2025	23 Orang	Konsultasi
2.	April – Juni 2025	31 Orang	Konsultasi
3.	Juli – September 2025	47 Orang	Konsultasi
4.	Oktober – Desember 2025	20 Orang	Konsultasi, Pembuatan Dokumen
Total		121 Orang	

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Pelayanan POSBAKUM Sanggau Tahun 2025

11. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pada Kabupaten Sekadau maka Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan sidang keliling pada Gedung Zitting Plaatz Pengadilan Negeri Sanggau yang berlokasi di Kabupaten Sekadau.

NO.	NOMOR PERKARA	DILAKSANAKAN
1.	No. 58/Pid.Sus/2025/PN Sag	April 2025
2.	No. 91/Pid.Sus/2025/PN Sag	Mei 2025
3.	No. 133/Pid.B/2025/PN Sag	Juni 2025
4.	No. 131/Pid.B/2025/PN Sag	Juni 2025
5.	No. 91/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sag	Juli 2025
6.	No. 223/Pid.Sus/2025/PN Sag	Agustus 2025
7.	No. 248/Pid.Sus-LH/2025/PN Sag	September 2025
8	No. 268/Pid.B/2025/ PN Sag	Oktober 2025
9.	No. 271/Pid.Sus-LH/2025/PN Sag	Oktober 2025
10.	No. 246/Pid.Sus/2025/PN Sag	Oktober 2025

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Sidang Keliling pada Zitting Plaatz PN Sanggau Tahun 2025

12. Perkara Prodeo/Pembebasan Biaya Perkara

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum,Dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Dalam proses peradilan atau penegakan hukum khususnya perkara Perdata, para pihak yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan / permohonan secara prodeo atau mendapatkan Pembebasan Biaya Perkara. Tentunya keadaan tidak mampu itu harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang bersangkutan. Sebelum suatu gugatan dicatat dalam buku register, penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara prodeo, yang apabila dikabulkan, Hakim membuat penetapan tentang ijin berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau memperoleh anggaran di DIPA 03 untuk melaksanakan perkara prodeo di tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau melaksanakan perkara prodeo pada gugatan dengan nomor perkara sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Pelaksanaan
1.	No. 19/Pdt.G/2025/PN Sag	20 Maret 2025

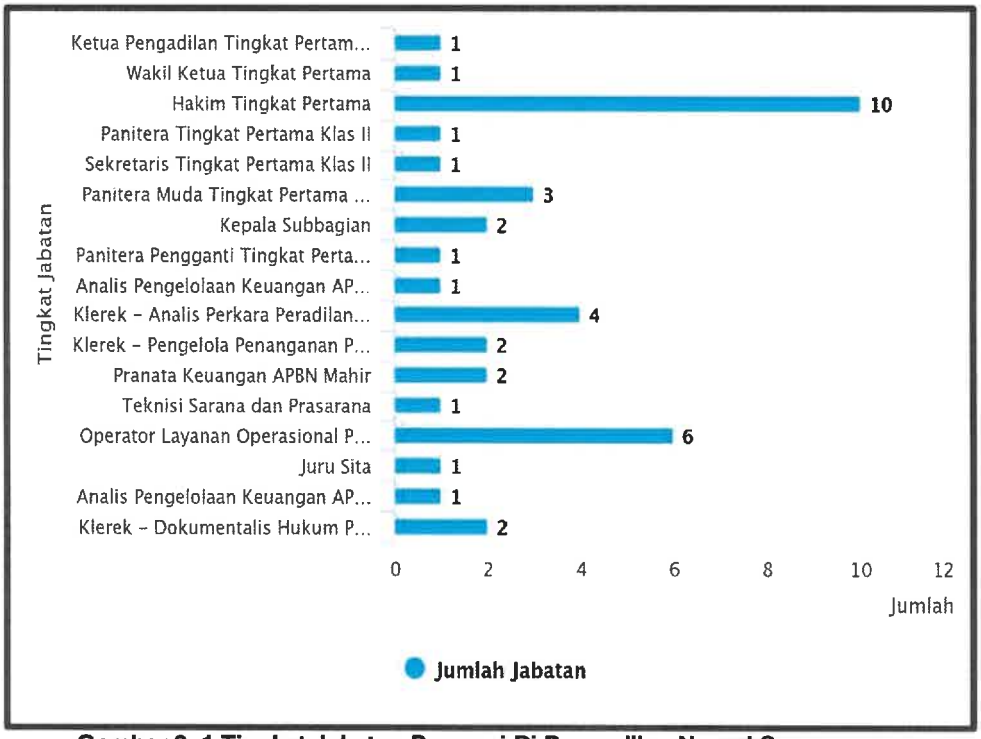
Tabel 2. 13 Rekapitulasi Perkara Prodeo PN Sanggau Tahun 2025

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM DI PENGADILAN NEGERI SANGGAU

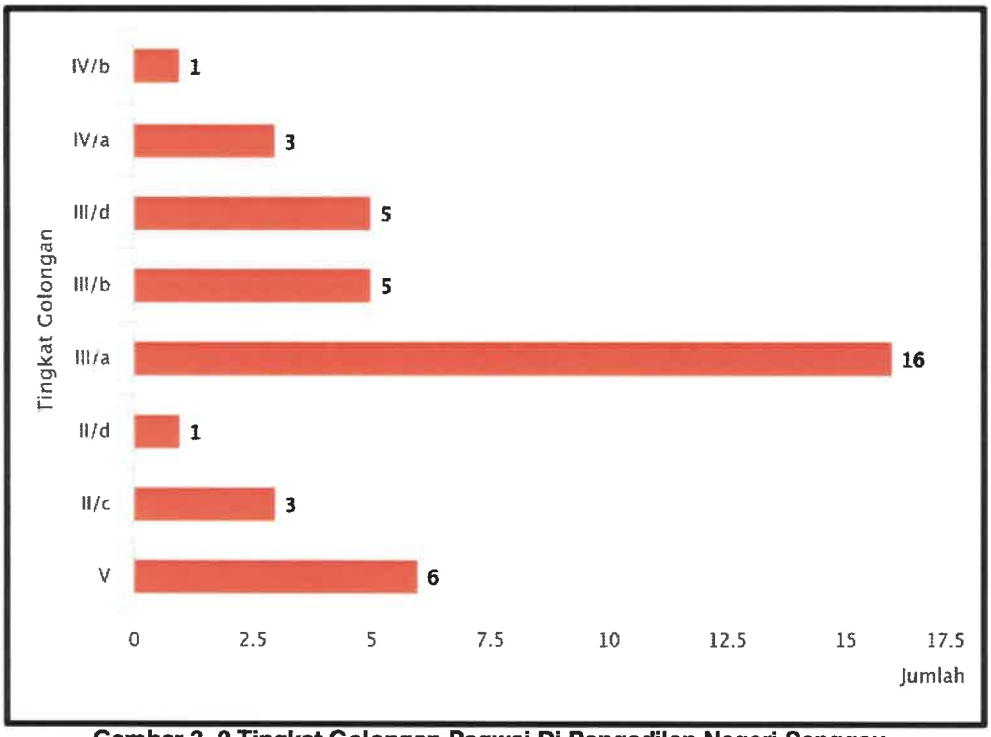
Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

a) Tingkat Jabatan Pegawai



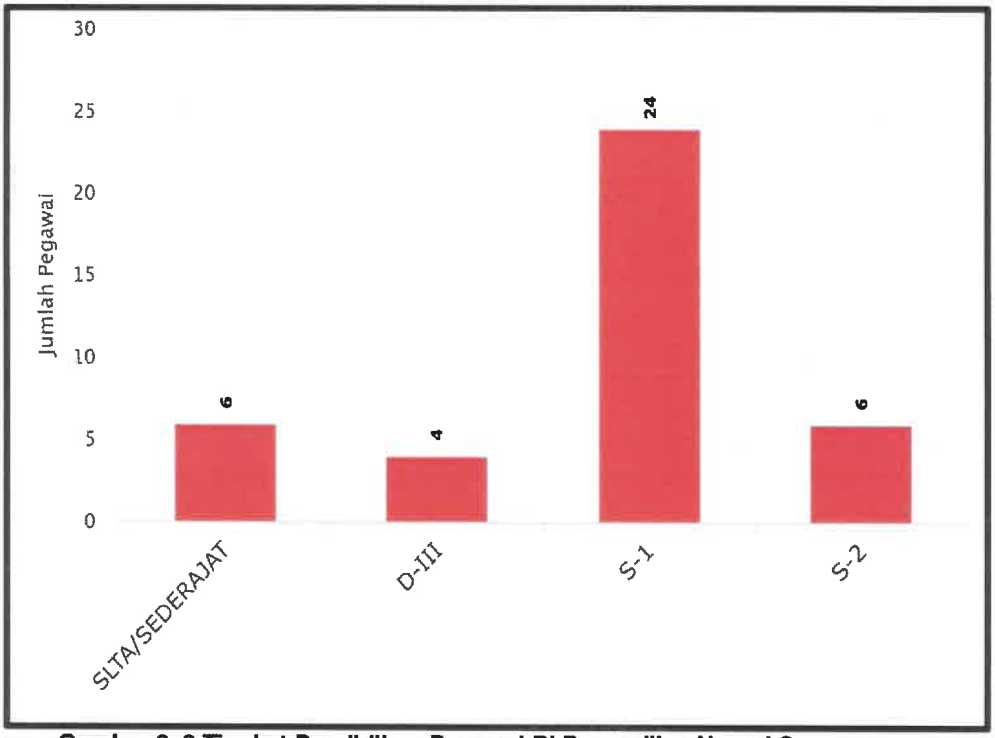
Gambar 3. 1 Tingkat Jabatan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau

b) Tingkat Golongan Pegawai



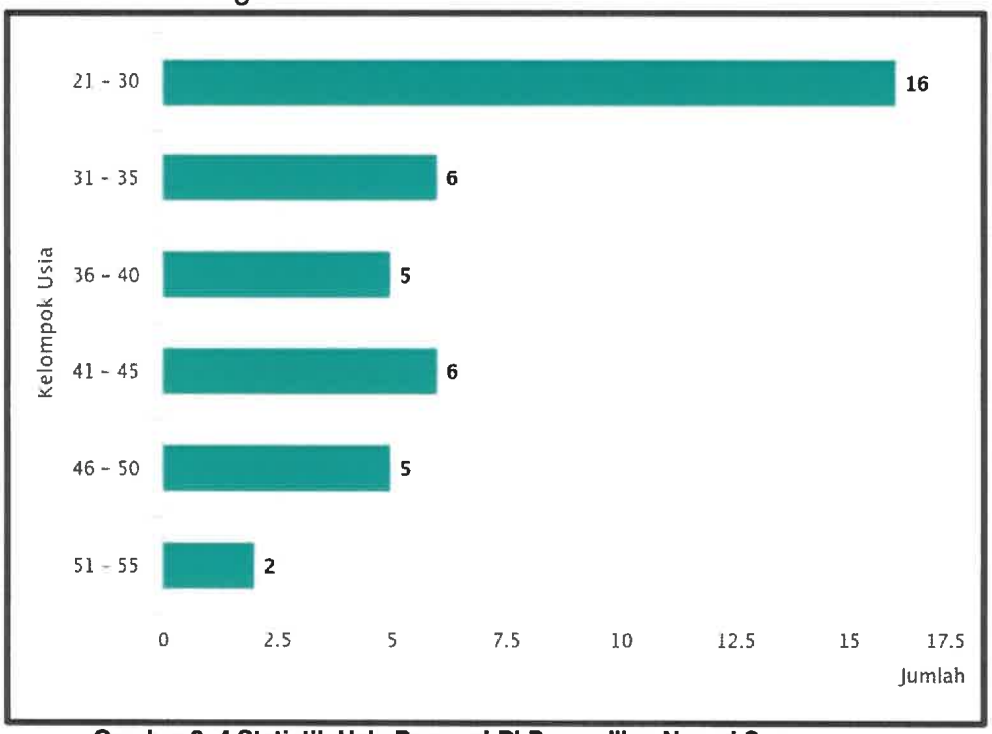
Gambar 3. 2 Tingkat Golongan Pegwai Di Pengadilan Negeri Sanggau

c) Tingkat Pendidikan Pegawai



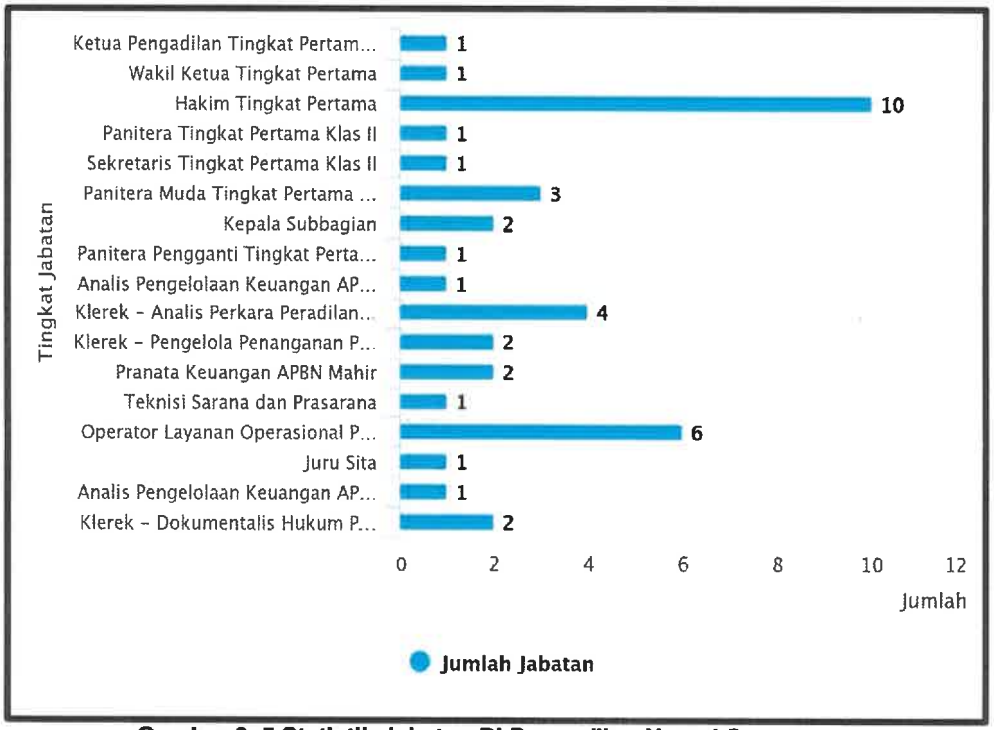
Gambar 3. 3 Tingkat Pendidikan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau

d) Statistik Usia Pegawai



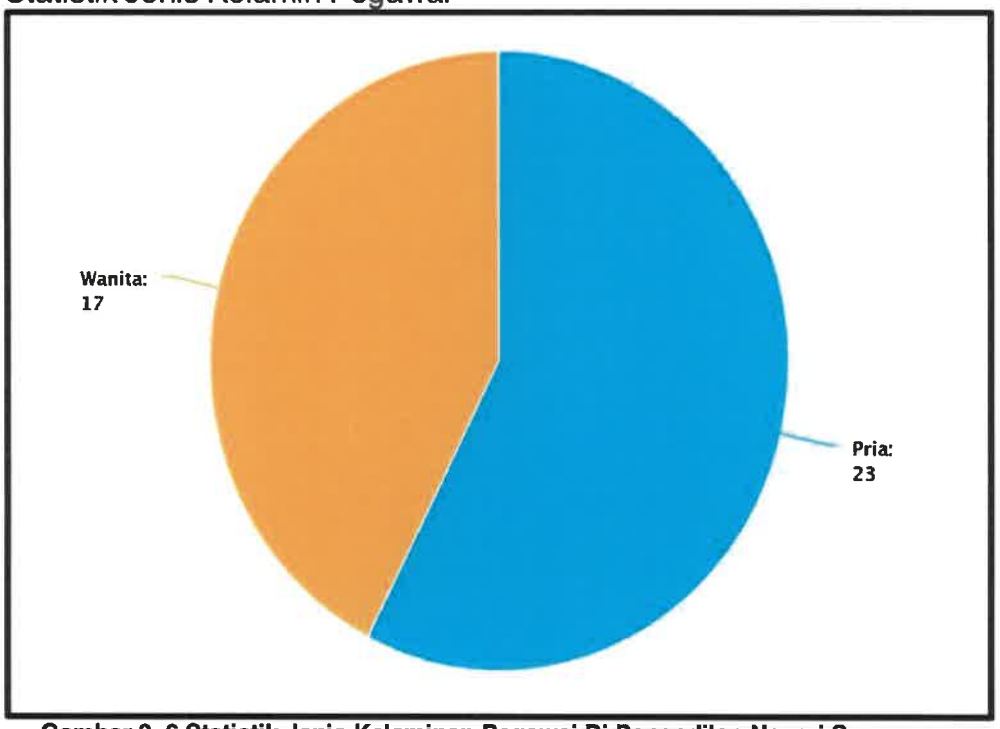
Gambar 3. 4 Statistik Usia Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau

e) Statistik Jabatan



Gambar 3. 5 Statistik Jabatan Di Pengadilan Negeri Sanggau

f) Statistik Jenis Kelamin Pegawai



Gambar 3. 6 Statistik Jenis Kelaminan Pegawai Di Pengadilan Negeri Sanggau

Tabel. 3 1 Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Victor Suryadipta, S.H., M.H.	197701062001121002	Ketua Pengadilan	2024-11-15	24 tahun 0 bulan	IV/b	2022-04-01	PASCASARJANA	Universitas Jaya Baya	2017
2	Erslan Abdillah, S.H.	198310012006041002	Wakil Ketua Pengadilan	2023-11-15	19 tahun 8 bulan	IV/a	2022-04-01	STRATA I	Unsud	2005
3	ZULKARNAIN, S.Kom., S.H., M.Ak.	198507302009041003	Sekretaris	2020-08-18	16 tahun 8 bulan	IV/a	2025-04-01	PASCASARJANA	Universitas Tanjungpura	2019
4	Ferri Yanuardi, S.H,. M.H.	198501292008051001	Panitera Tingkat Pertama	2024-05-27	17 tahun 7 bulan	IV/a	2025-04-01	PASCASARJANA	Universitas Tangjungpura, Pontianak	2024
5	Milawati, S.E.	197911242006042001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2023-06-19	19 tahun 8 bulan	III/d	2018-04-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2002
6	Warsidik, S.H.	197210271994031003	Panitera Muda	2023-05-24	31 tahun 9 bulan	III/d	2022-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2019
7	Nurhazizah, S.H	197002071994032004	Kepala Subbagian	2015-12-23	31 tahun 9 bulan	III/d	2025-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2024
8	Eva Susanti, S.H.	197807202012122001	Panitera Muda	2025-08-23	13 tahun 0 bulan	III/d	2025-04-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2001
9	Aulia Dwi Utami, S.H.	198808102012122002	Panitera Muda	2025-09-01	13 tahun 0 bulan	III/d	2025-04-01	STRATA I	-	2010
10	Budi Hartono, A.Md., S.H.	198401012011011015	Pranata Keuangan APBN Mahir	2021-04-01	14 tahun 11 bulan	III/b	2022-10-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2019
11	Rossanti, S.H.	198109282009122002	Kepala Subbagian	2025-09-16	16 tahun 0 bulan	III/b	2023-04-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2018

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Khairil Anwar, S.H.	198301102009121005	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2021-04-01	16 tahun 0 bulan	III/b	2023-04-01	STRATA I	Univrsitas Terbuka	2018
13	Fahmi, S.H.	197604012012121003	Pranata Keuangan APBN Mahir	2021-04-01	13 tahun 0 bulan	III/b	2023-10-01	STRATA I	Univrsitas Terbuka	2019
14	Zid Hartsa Firdausi, S.H., M.H.	199607242020122005	Panitera Pengganti	2025-09-01	5 tahun 0 bulan	III/b	2024-08-01	PASCASARJANA	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta	2019
15	Adiansyah Nurahman, S.H., M.H.	199411122022031003	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	PASCASARJANA	Universitas Diponegoro	2019
16	Jau'Za Lasta Kautsar, S.H., M.H.	199811172022032009	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	PASCASARJANA	Universitas Negeri Semarang	2024
17	Ariwisdha Nita Sahara, S.H.	198708132022032003	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Sebelas Maret	2009
18	Rizkia Santi Wardhani, S.H.	199004082022032006	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Diponegoro	2012
19	Nining Rosanti Dewi, S.H.	199105032022032004	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Diponegoro	2013
20	Fadillah Ayu Ariyati, S.H.	199303302022032009	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Semarang	2016
21	Sintha Yustika Putri, S.H	199612292022032006	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Diponegoro	2018
22	Ersdi Nofembrita, S.H.	199611302022031005	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Jenderal Soedirman	2019
23	Arif Bayuaji, S.H.	199710112022031004	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Sebelas Maret	2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN		MASA KERJA	GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN		
			JABATAN	TMT JABATAN		GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	INSTANSI PENDIDIKAN	TAHUN LULUS
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Dandi Narendra Putra, S.H.	199811162022031001	Hakim Tingkat Pertama	2025-06-19	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Gadjah Mada	2021
25	Jerman Kiki, S.H.	199705202022031002	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2025-06-05	3 tahun 9 bulan	III/a	2022-03-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2019
26	Hanif Firmansyah, S.H.	199812032024051002	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2025-05-02	1 tahun 7 bulan	III/a	2024-05-01	STRATA I	Universits Islam Indonesia	2021
27	Dian Leonaro Benny, S.H.	199807262024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2025-05-02	1 tahun 7 bulan	III/a	2024-05-01	STRATA I	Universitas Diponegoro	2022
28	Rezon Enrico, S.H.	200011232024051001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	2025-05-02	1 tahun 4 bulan	III/a	2024-05-01	STRATA I	Universitas Tanjungpura	2022
29	Alexander Sinaga, S.H.	198101022012121003	Juru Sita	2022-11-28	12 tahun 9 bulan	III/a	2025-06-01	STRATA I	Universitas Terbuka	2024
30	Alexander Sitorus, S.T.	199911072025061005	Teknisi Sarana dan Prasarana	2025-06-01	0 tahun 6 bulan	III/a	2025-06-01	STRATA I	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2023
31	Siti Auliati Agustina, A.Md.T.	199708052020122007	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara	2023-10-02	5 tahun 0 bulan	II/d	2024-12-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Sriwijaya	2018
32	Yunita Magdalena Siregar, A.md	199506132022032008	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	2023-10-02	3 tahun 9 bulan	II/c	2022-03-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Medan	2016
33	Bangkit Prayogi, A.Md.Kom.	199904082025061009	Klerek - Dokumentalis Hukum	2025-06-01	0 tahun 6 bulan	II/c	2025-06-01	DIPLOMA III	Universitas Amikom Yogyakarta	2020
34	Salsa Namira, A.Md.Kom.	200004212025062022	Klerek - Dokumentalis Hukum	2025-06-01	0 tahun 6 bulan	II/c	2025-06-01	DIPLOMA III	Politeknik Negeri Pontianak	2021

B. MUTASI

Pada tahun 2025 terdapat mutasi pegawai yang masuk dan keluar, antara lain :

g) Mutasi Masuk

No	Nama	Keluar	Tujuan
1.	Adiansyah Nurahman, S.H., M.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
2.	Jau'za Lasta Kautsar, S.H., M.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
3.	Ariwisdha Nita Sahara, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
4.	Rizkia Santi Wardhani, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
5.	Nining Rosanti Dewi, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
6.	Fadillah Ayu Ariyati, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
7.	Sintha Yustika Putra, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
8.	Ersdi Nofembrita, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
9.	Arif Bayuaji, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
10.	Dandi Narendra Putra, S.H.	Juni 2025	Hakim PN Sanggau
11.	Jerman Kiki, S.H.	Juni 2025	Analis Perkara Peradilan PN Sangggau

Tabel. 3 2 Mutasi Masuk Ke Pengadilan Negeri Sanggau

h) Mutasi Keluar

No	Nama	Keluar	Tujuan
1.	Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.	Juli 2025	PN Bangli
2.	Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.	Juli 2025	PN Mempawah
3.	Wakibosri Sihombing, S.H.	Juli 2025	PN Tanjung Balai
4.	Bahara Inovski S. Napitupulu, S.H.	Juli 2025	PN Tanjung Balai Karimun
5.	Muhammad Nur Hafizh, S.H.	November 2025	PN Koba

Tabel. 3 3 Mutasi Keluar Dari Pengadilan Negeri Sanggau

C. PROMOSI

Pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Sanggau terdapat promosi pegawai :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Rossanti, S.H.	Analis Pranata Keuangan	Kasub Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tabel. 3 4 Promosi Jabatan Di Pengadilan Negeri Sanggau

D. PENSIUN

Pada Tahun 2025 tidak terdapat pegawai Pengadilan Negeri Sanggau yang pensiun, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Pensiun
-	-	-	-

Tabel. 3 5 Tabel Pegawai Pensiun Di Pengadilan Negeri Sanggau

E. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Selama tahun 2025 beberapa Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau mengikuti diklat, antara lain :

No	Nama	Penyelenggara	Nama Diklat	Waktu
1.	Dian Leonaro Benny, S.H.	MARI Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Wilayah Megamendung secara Blended Learning Tahun 2025	8 Januari s.d 19 Maret 2025
2.	Hanif Firmansyah, S.H.	MARI Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Wilayah Megamendung secara Blended Learning Tahun 2025	8 Januari s.d 19 Maret 2025
3.	Rezon Enrico, S.H.	MARI Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Wilayah Megamendung secara Blended Learning Tahun 2025	8 Januari s.d 19 Maret 2025
4.	Dian Leonaro Benny, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS secara Klasikal	19 Maret s.d 27 Maret 2025
5.	Hanif Firmansyah, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS secara Klasikal	19 Maret s.d 27 Maret 2025
6.	Rezon Enrico, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS secara Klasikal	19 Maret s.d 27 Maret 2025
7.	Dandi Narendra Putra, S.H.	Pusdiklat Mahkamag Agung RI	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Seluruh Indonesia.	Tahap I : 2 s.d 12 Sept 2025 Tahap II : 14 s.d 27 Sept 2025

8.	Erslan Abdillah, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
9.	Ersdi Nofembrita, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
10.	Sintha Yustika Putri, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
11.	Adiansyah Nurahman, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
12.	Ariwisdha Nita Sahara, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
13.	Jau'Za Lasta Kautsar, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 22 s.d 23 Sept 2025 Tahap II : 24 s.d 26 Sept 2025
14.	Nining Rosanti Dewi, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 7 Okt 2025 Tahap II : 8 s.d 10 Okt 2025
15.	Arif Bayuaji, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 7 Okt 2025 Tahap II : 8 s.d 10 Okt 2025
16.	Fadillah Ayu Ariyati, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 7 Okt 2025 Tahap II : 8 s.d 10 Okt 2025

17.	Rizkia Santi Wardhani, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 7 Okt 2025 Tahap II : 8 s.d 10 Okt 2025
18.	Dandi Narendra Putra, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Singkat Pendalaman Subtansi dan Kebaruan Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023 Seluruh Indonesia	Tahap I : 6 s.d 7 Okt 2025 Tahap II : 8 s.d 10 Okt 2025
19.	Alexander Sitorus, S.T.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II dan III Tahun 2025 bersifat distance Learning.	3 (Tiga) Bulan
20.	Dandi Narendra Putra, S.H.	Badan Strajak, Diklat Hukum dan Peradilan	Mentor Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II Tahun 2025.	20 Oktober 2025 s/d 19 Desember 2025
21.	Ferri Yanuardi, S.H., M.H.	Mahkamah Agung RI	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Di Gedung Mahkmah Agung RI.	01-11-2025 s.d 02-11-2025
22.	Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.	Mahkamah Agung RI	Pembinaan Administrasi Kesekretariatan dari Pimpinan MA dan Pejabat Eselon I MA di Mahkmah Agung RI di Jakarta.	10-12-2025 s.d 13-12-2025

Tabel. 3 6 Tabel Diklat Di Pengadilan Negeri Sanggau

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKONOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan perubahan mendasar di bidang keuangan Negara termasuk reformasi di bidang penyusunan anggaran pemerintah (Kementerian/Lembaga) sebagai pelaksana UU No. 17 tahun 2003 tersebut. Pemerintah kemudian menerbitkan dua peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut tentang proses perencanaan dan proses penganggaran. Kedua PP tersebut adalah PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Sistem penyusunan anggaran ini tidak dapat dilaksanakan dengan seketika. Untuk itu pemerintah memberikan masa transisi 5 tahun lagi bagi Kementerian/Lembaga untuk dapat menerapkan sistem ini secara bertahap. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara juga berpedoman pada ketentuan UU No. 17 tahun 2003 dalam hal pembuatan anggaran dan laporan keuangannya. Sementara itu dengan adanya system satu atap maka Mahkamah Agung bertanggung jawab atas keseluruhan anggaran pengadilan sebagai satuan kerja yang berada dibawahnya. Anggaran Pengadilan Negeri Sanggau merupakan salah satu bagian dari anggaran Mahkamah Agung.

a) Realisasi Anggaran (DIPA 01) Badan Urusan Administrasi

DIPA Badan Urusan Administrasi untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp. 5.839.241.000 (Lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA PEGAWAI	4.584.315.000	99.81%	4.575.622.982	99.81%
BELANJA BARANG	1.148.426.000	99.74%	1.145.495.850	99.74%
BELANJA MODAL	106.500.000	99.62%	106.094.000	99.62%
TOTAL	**5.839.241.000**	**99.79%**	**5.827.212.832**	**99.79%**

Tabel 4. 1 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

b) Realisasi Anggaran (DIPA 03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Sanggau adalah sebesar Rp.228.853.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

JENIS BELANJA	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
BELANJA BARANG	228.853.000	99.74%	228.249.840	99.74%
TOTAL	**228.853.000**	**99.74%**	**228.249.840**	**99.74%**

Tabel 4. 2 Tabel Realisasi Anggaran DIPA 03 (Dirjen BADILUM)

Catatan :
Dari total Belanja Barang pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terdapat alokasi anggaran **Layanan Pos Bantuan Hukum** Sebesar Rp. 44.000.000 *(empat puluh empat juta rupiah)* dengan realisasi sebesar 100%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

c) Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1	1	-	-	Bangunan kantor belum sesuai dengan *Prototype* Mahkamah Agung
2	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	1	Rusak Berat
3	RUMAH DINAS WAKIL	1	1	-	-	-
4	RUMAH DINAS	7	7	-	-	-
5	ZITTING PLAATZ	3	1	-	2	Rusak berat 2 unit rusak ringan 1 unit

Tabel 4. 3 Pengelolaan Gedung dan Bangunan

d) Kendaraan Dinas

NO.	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	**JENIS KENDARAAN RODA 4**					
1	KIJANG INNOVA	2008	√	-	-	-
2	KIJANG MINIBUS KF 50	1993	-	√	-	-
3	KF70	2003	-	√	-	-
4	TOYOTA HILUX	2012	√	-	-	HIBAH PEMDA SANGGAU

5	TOYOTA INNOVA Adventurer	2020	√	-	-	HIBAH PEMDA SANGGAU
II	**JENIS KENDARAAN RODA 2**					
1	HONDA NF 125 SD	2005	√	-	-	-
2	HONDA NF 125 SD	2005	√	-	-	-
3	YAMAHA RXS	1993	√	-	-	-
4	HONDA NF 125 S	2005	√	-	-	-
5	YAMAHA JUPITER	2003	√	-	-	-

Tabel 4. 4 Pengelolaan Kendaraan Dinas

e) Rumah Dinas

NO.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KETERANGAN
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
1	RUMAH DINAS KETUA	1	-	√	-	-
2	RUMAH DINAS WAKIL KETUA	1	√	-	-	-
3	RUMAH DINAS HAKIM	5	√	-	-	-
4	RUMAH DINAS PANITERA	1	√	-	-	-
5	RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	√	-	-	-

Tabel 4. 5 Pengelolaan Rumah Dinas

f) Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KETERANGAN
I	**RUANG KANTOR**		
1	RUANG KETUA	1	-
2	RUANG WAKIL KETUA	1	-
3	RUANG HAKIM	1	-
4	RUANG PANITERA	1	-
5	RUANG SEKRETARIS	1	-
6	R. SIDANG UMUM	2	-
7	R. SIDANG ANAK	1	-
8	R.KEPANITERAAN	4	-
9	R.KESEKRETARIATAN	3	-
10	R.TELECONFRENCE / KAUKUS	1	-
11	R. MEDIASI / DIVERSI	1	-
12	R.TUNGGU ANAK	1	-
13	R.RAMAH ANAK / LAKTASI	1	-
14	R.PERPUSTAKAAN	1	-

15	R.ARSIP	1	-
16	R.GUDANG	2	-
17	R. TAHANAN	2	-
18	R. SERVER	1	-

Tabel 4. 6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

g) Pembelian/Pengadaan

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP)	TOTAL HARGA
1.	Air Conditioner (AC) 1 PK	Unit	6	9.500.000	57.000.000
2.	Tambah Daya Listrik	Unit	1	49.500.000	49.500.000
Jumlah					**106.500.000**

Tabel 4. 7 Pembelian/Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

h) Penerimaan Transfer Masuk dari Badan Urusan Mahkamah Agung RI

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP.)	TOTAL HARGA
-	NIHIL	-	-	-	-
Jumlah					-

Tabel 4. 8 Penerimaan Transfer Masuk dari Badan Urusan Mahkamah Agung RI

i) Penerimaan Hibah

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau mendapatkan Hibah sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG	SATUAN UKURAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN (RP.)	TOTAL HARGA
1	Kipas Dinding	Unit	2	1.640.000	3.280.000
2	Kamera DSLR EOS + Lensa Kit 18-55 mm	Unit	1	21.200.000	21.200.000
3	Smart TV 43 Inch	Unit	3	6.200.000	18.600.000
4	Smart TV 58 Inch	Unit	1	16.750.000	16.750.000
5	Kursi Hakim	Unit	3	5.675.000	17.025.000
6	Meja hakim Type C P.150 cm x L.100 cm x T.90 cm	Unit	2	9.430.000	18.860.000
7	Meja hakim Type A P.200 cm x L.100 cm x T.90 cm	Unit	1	13.890.000	13.890.000

8	Meja hakim Type B P.200 cm x L.100 cm x T.90 cm	Unit	1	10.590.000	10.590.000
9	Kursi Tunggu 4 Seat	Unit	2	5.900.000	11.800.000
Jumlah					**131.995.000**

Tabel 4. 9 Pererimaah Hibah

j) Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Sanggau mendapatkan Hibah sebagai berikut:

NO	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Lokasi	Tahun Perolehan	Ket
-	N I H I L	-	-	-	-	-

Tabel 4. 10 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

k) Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka mulai tanggal 1 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan penerimaan perkara perdata baik gugatan atau pun permohonan secara elektronik. Sehingga pada tahun 2025 seluruh perkara Perdata telah diterima melalui Aplikasi E-Court.

Berikut rekapitulasi perkara perdata Pengadilan Negeri Sanggau secara elektronik (e-court):

No	Jenis Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Ecourt	Elitigasi
1	Gugatan	83	83	83
2	Permohonan	111	111	111
3	Gugatan Sederhana	4	4	4
4	Permohonan Konsinyasi	10	10	10

Tabel 4. 11 Perkara Perdata Menggunakan E-Court

Dalam pelaksanaan penerapan Administrasi Perkara secara Elektronik baik e-court maupun e-litigasi, Pengadilan Negeri Sanggau telah memberikan fasilitas berupa e-court corner yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pengguna pengadilan,

pada e-court corner telah kami siapkan seperangkat alat komputer lengkap dengan printer dan scanner serta telah terkoneksi dengan jaringan internet.



Gambar 4. 1 Meja E-Court Corner Pengadilan Negeri Sanggau

I) Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan Aplikasi Utama pada Pengadilan Negeri Sanggau, Aplikasi ini sangat penting mengingat seluruh proses perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau telah di input pada aplikasi tersebut sehingga menjaga agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan terus menerus adalah menjadi suatu keharusan mutlak.

Selain Server yang dikirimkan langsung dari Mahkamah Agung RI, pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Sanggau juga mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau untuk pengadaan server sehingga sampai akhir Desember 2019 Pengadilan Negeri Sanggau memiliki 3 (tiga) buah server untuk menangani Aplikasi SIPP, PTSP dan Backup data SIPP Pengadilan Negeri Sanggau.

Setiap proses perkara secara rutin telah diinput melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau selama perkara tersebut telah diakomodir oleh Aplikasi SIPP.

Untuk Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sanggau pada periode Januari – Desember 2025 mendapatkan Total 98.62%.

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
1	Kinerja	**Penyelesaian Perkara Tepat Waktu** Penyelesaian perkara dalam waktu 5 (lima) Bulan (PIDANA – Tgl.Pendaftaran s/d Tgl.Putusan / PERDATA – Tgl.Sidang Pertama s/d Tgl.Putusan) – (Nilai Maksimal 80.00)	79.74
2	Kinerja	**Rilis Versi SIPP** Versi SIPP yang terpasang di satuan kerja – (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
3	Kinerja	**Kesesuaian Kode Satker Nomor Perkara** Kesesuaian kode satker pada nomor perkara sesuai dengan SK KMA Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 – (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
4	Kinerja	**Jangka Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk** Waktu Pelaksanaan Delegasi Masuk, Maksimal 7 Hari Kerja – (Nilai Maksimal 5.00)	5.00
5	Kinerja	**Pelaksanaan Mediasi** Keberhasilan Pelaksanaan Mediasi - (Nilai Maksimal 5.00)	0.50
6	Kepatuhan	**Pendaftaran Perkara** Kepatuhan pendaftaran perkara dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
7	Kepatuhan	**Pencatatan Barang Bukti** Kepatuhan Pengguna dalam mengisi Barang Bukti - (Nilai Maksimal 8.00)	8.00
8	Kepatuhan	**Penetapan Hakim** Kepatuhan penetapan majelis/hakim dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
9	Kepatuhan	**Penetapan Panitera Pengganti** Kepatuhan penetapan panitera pengganti dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
10	Kepatuhan	**Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti** Kepatuhan penetapan jurusita dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
11	Kepatuhan	**Penetapan Hari Sidang Pertama** Kepatuhan penetapan hari sidang pertama dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
12	Kepatuhan	**Penginputan Tuntutan** Ketepatan Waktu dalam input Tuntutan dalam suatu perkara - (Nilai Maksimal 25.00)	24.75
13	Kepatuhan	**Penginputan Putusan Akhir** Ketepatan Waktu dalam input Putusan dalam suatu perkara - (Nilai Maksimal 25.00)	24.88
14	Kepatuhan	**Penginputan Minutasi** Kepatuhan penginputan minutasi maksimal 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	24.88
15	Kepatuhan	**Pelaksanaan Minutasi** Ketepatan waktu dalam melakukan minutasi dalam waktu 7 Hari (Pidana) dan 14 Hari (Perdata) - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
16	Kepatuhan	**Penginputan Permohonan Banding** Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Banding dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 7.00)	7.00
17	Kepatuhan	**Penginputan Permohonan Kasasi** Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Kasasi dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 7.00)	7.00
18	Kepatuhan	**Penginputan Permohonan Peninjauan Kembali** Kepatuhan waktu dalam input Permohonan Peninjauan Kembali dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 7.00)	7.00
19	Kepatuhan	**Pengiriman Berkas Banding** a. Pelaksanaan Pemberitahuan Permohonan Banding (Nilai Maksimal 2) b. Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Berkas (Inzage) (Nilai Maksimal 2) c. Pengiriman Berkas Banding ke Pengadilan Tinggi - 30 Hari (Perdata)/ 14 Hari (Pidana) (Nilai Maksimal 2)	6.74
20	Kepatuhan	**Pengiriman Berkas Kasasi** a. Pelaksanaan Pemberitahuan Permohonan Kasasi (Nilai Maksimal 1) b. Penerimaan Memori Kasasi (Nilai Maksimal 1) c. Penyerahan Memori Kasasi Kepada Termohon (Nilai Maksimal 1) d. Pengiriman Berkas Kasasi ke Mahkamah Agung (Nilai Maksimal 1)	7
21	Kepatuhan	**Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali** a. Pelaksanaan Pemberitahuan Permohonan PK (Nilai Maksimal 1) b. Penerimaan Memori PK (Nilai Maksimal 1) c. Penerimaan Kontra Memori PK (Nilai Maksimal 1) d. Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung (Nilai Maksimal 1)	0
22	Kepatuhan	**Pemberitahuan Putusan/Penetapan** Kepatuhan waktu dalam input tanggal pemberitahuan putusan dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
23	Kepatuhan	**Penginputan Penetapan Majelis/Hakim** Kepatuhan waktu dalam input penetapan Majelis Hakim/Hakim dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
24	Kepatuhan	**Penginputan Penunjukan Panitera Pengganti** Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Panitera Pengganti dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
25	Kepatuhan	**Penginputan Penetapan Hari Sidang** Kepatuhan waktu dalam input penetapan hari sidang dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	24.96
26	Kepatuhan	**Penginputan Penetapan Jurusita/Jurusita Pengganti** Kepatuhan waktu dalam input penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
27	Kepatuhan	**Penginputan Data Pelaksanaan Delegasi** Kepatuhan waktu dalam input Data Pelaksanaan Delegasi dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 10.00)	10.00
28	Kepatuhan	**Kepatuhan Penundaan Jadwal Sidang** Kepatuhan input penundaan jadwal sidang dalam waktu 1x24 jam - (Nilai Maksimal 25.00)	24.60

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
29	Kepatuhan	**Penginputan Penetapan Perpanjangan Penahanan** Kepatuhan penginputan perpanjangan penahanan maksimal 1x24 jam sejak tanggal penetapan - (Nilai Maksimal 20.00)	19.76
30	Kepatuhan	**Unggah Putusan Akhir** Kepatuhan unggah dokumen Putusan Akhir maksimal 1x24 jam sejak tanggal putus - (Nilai Maksimal 20.00)	19.35
31	Kepatuhan	**Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Perdata** Kepatuhan Pelaksanaan TTE terhadap Salinan Putusan Perkara Perdata (Maksimal 1x24 Jam sejak Tanggal Putusan) - (Nilai Maksimal 20.00)	19.40
32	Kepatuhan	**Tanda Tangan Elektronik Salinan Putusan Perkara Pidana** Kepatuhan Pelaksanaan TTE terhadap Salinan Putusan Perkara Pidana (Maksimal 1x24 Jam sejak Tanggal Putusan) - (Nilai Maksimal 20.00)	19.75
33	Kelengkapan	**E-Document Dakwaan/Petitum** Kelengkapan Dokumen Elektronik dalam pendaftaran perkara (Data Umum) - (Nilai Maksimal 15.00)	15.00
34	Kelengkapan	**Pencatatan Saksi** Kelengkapan pencatatan Data Saksi - (Nilai Maksimal 5.00)	5.00
35	Kelengkapan	**E-Document Tuntutan** Kelengkapan Dokumen Elektronik Tuntutan - (Nilai Maksimal 15.00)	15.00
36	Kelengkapan	**E-Document Putusan Akhir/Penetapan** Kelengkapan Dokumen Elektronik Putusan - (Nilai Maksimal 15.00)	15.00
37	Kelengkapan	**Data Lapor Mediasi** Kesesuaian pencatatan Tanggal Lapor Mediasi - (Nilai Maksimal 5.00)	5.00
38	Kelengkapan	**Data Diversi** Kesesuaian pencatatan Tanggal Lapor Diversi - (Nilai Maksimal 4.00)	4.00
39	Kelengkapan	**Data Nilai Sengketa** Kesesuaian pencatatan Nilai Sengketa dalam Perkara Gugatan Sederhana - (Nilai Maksimal 4.00)	4.00
40	Kelengkapan	**Dokumen Elektronik Berita Acara Sidang** Ketersediaan Dokumen Berita Acara Sidang - (Nilai Maksimal 20.00)	19.99
41	Kelengkapan	**Dokumen Elektronik Relaas Panggilan Sidang Pertama** Ketersediaan Dokumen Berita Relaas - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
42	Kelengkapan	**Dokumen Elektronik Rencana Persidangan (Court Callendar)** Ketersediaan Dokumen Elektronik Rencana Persidangan (Court Callendar) - (Nilai Maksimal 20.00)	19.90
43	Kelengkapan	**Dokumen Elektronik Putusan Anonimisasi** Ketersediaan Dokumen Elektronik Putusan yang sudah dilakukan Anonimisasi (SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022) - (Nilai Maksimal 20.00)	19.47
44	Kesesuaian	**Agenda Sidang Terakhir** Kesesuaian Agenda Sidang Terakhir dengan status perkara putus - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
45	Kesesuaian	**Tanggal Putusan dan Tanggal Sidang Terakhir** Kesesuaian Tanggal Sidang Terakhir dengan Tanggal Putusan - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00

NO	KATEGORI	UNSUR	NILAI
46	Kesesuaian	**Publikasi Pihak** Kesesuaian Publikasi Perkara sesuai SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 - (Nilai Maksimal 25.00)	24.74
47	Kesesuaian	**Pelaksanaan BHT** Ada Atau Tidaknya Pencatatan BHT pada suatu perkara - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
48	Kesesuaian	**Penahanan** Kesesuaian pencatatan penahanan habis sebelum perkara putus - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
49	Kesesuaian	**Sisa Biaya Perkara Tk Pertama** Kesesuaian pencatatan pengembalian sisa panjar - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
50	Kesesuaian	**Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP WEB** Kesesuaian Sinkronisasi SIPP WEB - (Nilai Maksimal 25.00)	25.00
51	Kesesuaian	**Verifikasi Dokumen Elektronik Elitigasi** Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Elektronik Elitigasi oleh Majelis Hakim/ Hakim - (Nilai Maksimal 20.00)	19.66
52	Kesesuaian	**Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI** Pelaksanaan Sinkronisasi SIPP ke Data Center MARI - (Nilai Maksimal 20.00)	20.00
53	Kesesuaian	**Pengarsipan Perkara** Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Pengarsipan Perkara (SOP Kepaniteraan) - (Nilai Maksimal 20.00)	18.91

Tabel 4. 12 Detail Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sanggau Januari – Desember 2025

Sumber : http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/

Adapun guna mendukung proses sinkronisasi data SIPP Pengadilan Negeri Sanggau ke SIPP Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sanggau menggunakan akses internet sebanyak 1 (satu) line dengan kapasitas 100 mbps, ditambah 1 (satu) line Icon Plus berkapasitas 100 mbps sehingga diharapkan proses sinkronisasi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk dukungan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sanggau memiliki dukungan teknis dari 1 (satu) orang Kasubbag dan 1 (satu) orang staf yang menangani permasalahan teknis dalam penerapan SIPP di Pengadilan Negeri Sanggau.

Selain melakukan sinkronisasi ke SIPP Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sanggau juga melakukan sinkronisasi ke Pengadilan Tinggi sebagai backup database dan ke SIPP Web yang terpasang di Website Pengadilan Negeri Sanggau dengan alamat *http://sipp.pn-sanggau.go.id/* sehingga memudahkan bagi para pengguna pengadilan untuk dapat melihat perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau. Adapun proses sinkronisasi ke SIPP Web tersebut

dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari guna menjaga agar data yang disajikan tetap update.

Aplikasi ini diharapkan akan dapat membantu memonitoring kualitas data SIPP dan dapat menjadi aplikasi standar monitoring yang diterapkan diseluruh satuan kerja pada lingkup peradilan umum.

Untuk Penilaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 dalam hal Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Perkara Pengadilan (SIPP) dalam satu tahun yang biasanya dapat dilihat pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat url http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/.

m) Implementasi E-Berpadu di Lingkungan Pengadilan Negeri Sanggau

Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan bagi para APH/mayarakat umum/Penasihat Hukum dalam hal administrasi perkara pidana di wilayah Kabupaten Sanggau pada Pengadilan Negeri Sanggau. Aplikasi ini merupakan sebagai salah satu pengembangan SPPT-TI untuk mewujudkan sistem Peradilan Pidana secara Elektronik sebagaimana telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan diharapkan dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi yang tujuannya untuk memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik. Aplikasi ini sangat penting mengingat seluruh proses perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau telah di input pada aplikasi tersebut.

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau sebesar 99,65% dengan nilai persepsi 3,99 dan Mutu Pelayanan A yang berada pada kategori SANGAT BAIK.

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
8. Sarana Prasarana di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Sanggau pada kategori SANGAT BAIK.

Dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Sanggau diperoleh informasi bahwa Pengadilan Negeri Sanggau memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi yaitu 3,98 atau nilai persentase 99,61%, dan masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi. Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut merupakan kumpulan dari indeks 10 (sepuluh) indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,906.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000.

3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,875.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,906.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,906.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,813.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta untuk melayani para Pengguna Pengadilan maka seluruh layanan Perkara maupun layanan umum lainnya pada Pengadilan Negeri Sanggau dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu.

Pengadilan Negeri Sanggau menyiapkan Meja PTSP yang diantaranya memberikan Pelayanan antara lain : Bagian Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan Hukum.



Gambar 5. 1 Meja Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri Sanggau

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

- Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan layanan asisten virtual melalui aplikasi WhatsApp.
- Pengadian Negeri Sanggau menyediakan e-Court Corner yang dapat digunakan oleh setiap pengguna pengadilan.
- Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan Meja Inzaghe yang dapat digunakan oleh para pihak untuk memeriksa berkas.
- Pengadilan Negeri Sanggau memberikan pendampingan dalam penggunaan aplikasi e-court dan aplikasi eraterang kepada para pengguna pengadilan.
- Informasi Pengadilan Negeri Sanggau dapat diakses melalui website resmi di www.pn-sanggau.go.id
- Memberikan pelayanan yang ramah dan humanis kepada setiap pengguna pengadilan dengan salam, senyum dan sapa.
- Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga masyarakat atau pun pengguna pengadilan dapat mendapatkan pelayanan yang efektif dan efesien.
- Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Aplikasi e-Berpadu sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
- Pengadilan Negeri Sanggau telah menerapkan Aplikasi Lapor Pan (Layanan Permintaan Informasi Putusan dan Penetapan) adalah inovasi dari Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Salah satu objek permintaan informasi yang wajib tersedia setiap saat yakni salinan putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tertap. Lapor Pan dapat digunakan oleh Kepolisian, Kejaksaan, masyarakat umum dan mahasiswa untuk mengajukan permintaan informasi berupa salinan putusan dan penetapan kapanpun dan dimanapun tanpa perlu datang ke Pengadilan Negeri Sanggau.
- Digitalisasi pengelolaan dan permintaan ATK melalui Inveska (Inventory System ATK) di Pengadilan Negeri Sanggau. Layanan permintaan ATK untuk pengadaan permintaan ATK setiap bulan yang sudah terdigitalisasi dan

terintegrasi. Beberapa alur tahapan seperti scan QR code, isi data diri dan kebutuhan ATK, operator cek permintaan ATK di google sheets, operator koordinasi kasub umum dan keuangan list barang dan belanja, ATK datang dan input barang di Aplikasi Inveska pada fitur barang masuk, input barang keluar di aplikasi pada fitur barang keluar dan ATK di serahkan bersama surat serah terima barang. Fokus pada pengadaan bulanan permintaan ATK.

BAB VI
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Untuk Pengawas Bidang telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 56/KPN/SK.KP4.1.4/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, Nomor : 415/KPN/SK.KP4.1.4/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, kemudian diperbaharui dengan Nomor : 671/KPN/SK.KP4.1.4/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan bidang setiap bulannya yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan serta guna melaksanakan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33/BP/SK/II/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler maka pada tanggal 6 Feruari 2025 - 7 Februari 2025 Tim Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan Pengawasan Reguler pada Pengadilan Negeri Sanggau.
- Pembinaan yang dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Bapak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. Dalam kesempatan tersebut beliau

selalu mengingatkan agar seluruh Hakim dan Pegawai selalui menaati PERMA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atasan langsung Serta PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan. Selain itu beliau juga mengingatkan kepada para Hakim agar selalu menjaga integritas dalam menangani setiap perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sanggau serta menerapkan gaya hidup yang sedehana dan tidak berlebih lebihan. Beliau juga menyampaikan agar seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Sanggau selalu menjaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

- Pembinaan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Bpk Erwin Djong S.H.,M.H. Pada Pengadilan Negeri Sanggau , yang di Hadiri Oleh Bpk Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Bpk. Jon Makmur Saragih, S.H., M.H. dan Seluruh Hakim, Pegawai dan P3K PN. Sanggau.

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Sanggau baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Selain itu minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan telah diadakan rapat untuk mengevaluasi semua kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya serta melakukan pembinaan terhadap hakim, panitera, panitera pengganti, jurusita pengganti, sub bagian, baik secara tehnis maupun non tehnis dengan maksud untuk

memacu semangat kerja masing – masing pegawai agar dapat diharapkan semakin hari kinerja akan semakin baik dan secara khusus adalah penekanan terhadap minutasi perkara dan permasalahan – permasalahan yang mungkin timbul.

Pada rapat bulanan tersebut setiap bagian juga membuat laporan hasil kegiatan untuk dilaporkan pada rapat bulanan, yaitu kegiatan dari masing – masing bagian pada bulan sebelumnya. Sehingga dengan adanya laporan tersebut kinerja masing – masing bagian dapat diketahui.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

1. Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Sanggau walaupun dalam realisasinya belum optimal.
2. Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri Sanggau.
3. Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2024 ini masih terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024 sehingga harus diselesaikan di tahun 2025.
4. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.
5. Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2025 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun terbatas pada menunggu pemanggilan peserta yang akan mengikuti DIKLAT baik itu dari tingkat banding, Mahkamah Agung RI ataupun dari Balitbang Diklat Kumdil. Namun kami berusaha sedapat mungkin terhadap pemanggilan Peserta Diklat dapat Kami Penuhi dengan baik
6. Dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan, masih terdapat fasilitas peralatan kantor yang telah lama sehingga setiap tahun diperlukan pengadaan meubelair maupun fasilitas peralatan kantor.
7. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
8. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Sanggau telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standard Operating Procedure (SOP).

9. Pengadilan Negeri Sanggau sudah terdapat beberapa orang tenaga fungsional kesekretariatan di Pengadilan Negeri Sanggau.
10. Bahwa gedung kantor Pengadilan Negeri Sanggau yang tidak lagi memadai yaitu ruangan hakim sudah tidak layak dan sempit, ruang arsip yang sudah tidak cukup lagi untuk menampung arsip perkara, selain itu gedung juga tidak sesuai prototype, karena itu kami memerlukan anggaran untuk gedung baru agar sesuai prototype dan untuk penambahan ruangan.
11. Bahwa selain kurangnya tenaga (SDM), juga sarana dan prasarana belum mencukupi

    Sarana :

    Bahwa di Pengadilan Negeri Sanggau kurang luasnya lahan parkir untuk pengunjung maupun pengguna pengadilan.

    Prasarana :

    Kendaraan dinas roda dua berupa sepeda motor yang dimana medan yang ditempuh pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau sangat berat sehingga memerlukan kendaraan roda dua atau sepeda motor jenis Trail;

B. REKOMENDASI

- Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi mengenai Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035.
- Dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk mengadakan Bimbingan Teknis, baik bidang Kepaniteraan terutama tentang keuangan perkara perdata (kasir), bimbingan teknis berkelanjutan panitera pengganti dan jurusita maupun bidang Kesekretariatan terutama Manajemen Kepegawaian, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan serta Penyusunan LKjIP dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- Mengingat pentingnya dukungan terhadap Teknologi dan Informasi diharapkan Mahkamah Agung RI mengambil langkah untuk peningkatan Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknis Informasi dan Teknologi guna mendukung pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI.
- Pengadilan Negeri Sanggau berharap untuk tahun berikutnya mendapat alokasi dana untuk renovasi gedung kantor sehingga sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.